

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Aisikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Barata, Atep Adya dan Zul Afdi Ardian, *Perpajakan Jilid I*. Bandung: Armico, 1989.
- Bohari .H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo, 2004.
- Brotodiharjo, Santoso. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Casavera. *Perpajakan*. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Darussalam, Donny Septriadi. *Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Dirdjosiswono, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 1989
- Fidel. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana, 2010.
- Ghofur, Abdul, Anshori. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Hutagaol, John, Darussalam dan Danny Septriadi. *Kapita Selektta Perpajakan*. Jakarta: Salemba empat, 2007.
- Hadi, Moeljo. *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah. (Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Ilyas, B, Wirawan dan Richard Burton. *Hukum Pajak Edisi Keempat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008.
- Judisseno, Rimsky K. *Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008.

- Muljono, Djoko. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008.
- Nurmanto, Safri dan Azhari A. Samudra. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2003.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sihombing, Sihar. *Hukum Imigrasi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sumitro, Rochmat. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Bandung: PT. Eresco, 1991.
- Suandy, Early. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.

B. Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa.
- Republik Indonesia. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02 um.09.01.2003 dan 294 /KMK.03 / 2003 Tanggal 25 Juni 2003 Tentang Pencegahan dan Penyanderaan.
- Republik Indonesia. Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor S-158 / PJ.75 /2006 Tentang Pencegahan dan Penyanderaan.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 23/ PMK.03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85 / KMK.03 / 2002 Tentang tata cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-undang Pengadilan Pajak.

Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Republik Indonesia. Undang-undang nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

C. INTERNET

1. Sejarah Lelang, <http://www.google.com>
2. Sejarah Pajak, <http://www.google.com>